

Ketimpangan Pengetahuan Lingkungan antara Masyarakat Kota dan Desa

Dian Aulia Purnama¹, Alifia Izmi Azzahra², Ani Gustina³, Aliya Saputry⁴,
Indah Syahfitri⁵, Farhan Alhu Linadri⁶, Muhammad Hidayat⁷, Delmira Syafrini^{8*}

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi sosiologis terhadap fenomena ketimpangan pengetahuan lingkungan yang terjadi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Secara mendalam, kajian ini hendak memetakan sejauh mana disparitas posisi sosial dan aksesibilitas wilayah mempengaruhi derajat penguasaan informasi krisis ekologi serta kesiapsiagaan bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berlandaskan paradigma interpretatif, dengan menerapkan studi perbandingan antara karakteristik wilayah urban dan rural. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang meliputi wawancara mendalam terhadap informan lintas generasi, observasi partisipatif pada fasilitas publik, serta studi dokumentasi literatur sekunder terkini. Hasil penelitian mengungkap bahwa masyarakat perkotaan memiliki keunggulan akses informasi berbasis teknologi digital serta literasi lingkungan teoretis-global. Sebaliknya, masyarakat pedesaan mengalami kendala infrastruktur digital dan "kemiskinan informasi", tetapi memiliki keunggulan dalam pengetahuan praktis yang berakar kuat pada kearifan lokal, norma adat, dan sensitivitas ekologis langsung. Kesenjangan pengetahuan ini diperburuk oleh pola komunikasi kebijakan pemerintah yang terlalu elitis dan bersifat dari atas ke bawah (top-down), sehingga istilah ilmiah sulit dipahami masyarakat bawah. Studi ini menyimpulkan pentingnya peran mahasiswa sebagai jembatan informasi untuk merumuskan model komunikasi kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan transformatif guna mengintegrasikan pengetahuan saintifik modern dengan kearifan lokal demi mewujudkan keadilan ekologis serta pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pengetahuan; Literasi Bencana; Pembangunan yang Berkelanjutan.

Abstract

This research aims to conduct a sociological deconstruction of the environmental knowledge disparity phenomenon between urban and rural communities in Indonesia. In depth, this study examines how disparities in social positioning and regional accessibility influence the level of ecological crisis information mastery and disaster preparedness. The method used in this research is descriptive qualitative based on an interpretive paradigm, applying a comparative study between urban and rural regional characteristics. Data were collected through triangulation techniques, including in-depth interviews with intergenerational informants, participatory observation of public facilities, and documentation studies of recent secondary literature. The results reveal that urban communities excel in accessing information based on digital technology and possess theoretical-global environmental literacy. Conversely, rural communities experience constraints in digital infrastructure and "information poverty," yet maintain a superior grasp of practical knowledge rooted in local wisdom, customary norms, and direct ecological sensitivity. This knowledge disparity is exacerbated by government policy communication patterns that are overly elitist and top-down, making scientific terms difficult for grassroots communities to comprehend. This study concludes the importance of university students' role as information bridges to formulate inclusive, participatory, and transformative policy communication models to integrate modern scientific knowledge with local wisdom in order to achieve environmental justice and sustainable development.

Keywords: Disaster Literacy; Knowledge Disparity; Sustainable Development.

How to Cite: Purnama, D. A. et al. (2026). Ketimpangan Pengetahuan Lingkungan antara Masyarakat Kota dan Desa. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2026. (pp. 173-181). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

Pendahuluan

Pengetahuan lingkungan adalah suatu pembentukan kognitif dan konstruksi sosial yang dinamis, meliputi pemahaman mendalam individu atau kelompok terhadap perubahan ekosistem, kesadaran kritis akan potensi risiko bencana, serta kapasitas adaptif untuk mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan material manusia dan kelestarian alam jangka panjang. Konten dari pemahaman lingkungan yang di mana persepsi kolektif dibentuk oleh realitas ruang hidup sehari-hari, membuktikan bahwa kesadaran ekologis tidak lahir di ruang hampa melainkan diproduksi melalui interaksi sosial yang terus-menerus. Namun, realitas empiris di Indonesia menunjukkan bahwa distribusi modal pengetahuan tersebut tidak berjalan secara merata, melainkan mengalami segregasi yang sangat tajam akibat adanya ketimpangan pembangunan sosial serta keterbatasan aksesibilitas antara masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketidakseimbangan ini merupakan refleksi dari dinamika struktural yang rumit dan telah berlangsung lama dalam sejarah pembangunan nasional. Menurut [Nurafifah & Ningsih \(2026\)](#), dalam ranah pendidikan dan adopsi informasi, terjadi perbedaan laju penyesuaian yang mencolok di mana masyarakat kota jauh lebih adaptif terhadap pembaruan daripada masyarakat desa. Kesenjangan yang akut ini dipertegas oleh analisis [Syaronica \(2024\)](#), yang menyatakan bahwa disparitas adopsi teknologi serta ketidakmerataan sarana pendidikan dasar antara wilayah rural dan urban telah memicu fenomena "kebutaan informasi" (information blindness) di tingkat pedesaan. Akibatnya, masyarakat desa sering kali terlambat atau bahkan tidak mengetahui sama sekali perkembangan isu ekologis global yang semakin mendesak demi keselamatan ruang hidup mereka.

Akar dari ketidaksetaraan distribusi pengetahuan ini memiliki karakter yang sangat struktural dan berdimensi ekonomi makro maupun mikro. [Gafur et al \(2025\)](#) dalam kajian sosiologi ekonominya mencatat bahwa meskipun pemerintah terus meluncurkan berbagai program pembangunan wilayah, disparitas nyata dalam akses terhadap layanan publik dasar dan infrastruktur siber masih menjadi tembok penghalang yang tebal bagi kemajuan masyarakat di daerah pelosok. Fenomena ini menjadi sebuah paradoks besar jika disandingkan dengan analisis dari [Yenny et al. \(2025\)](#) mengenai perbandingan sosiopolitik desa dan kota. Karakteristik utama perekonomian pedesaan yang masih sangat tergantung pada sektor utama atau sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan secara otomatis menempatkan kehidupan sehari-hari mereka pada posisi yang paling berinteraksi langsung dan bergantung pada stabilitas alam. Dengan kata lain, masyarakat desa adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak destruktif dari perubahan lingkungan, namun secara ironis mereka justru merupakan kelompok yang paling sedikit mendapatkan akses terhadap pengetahuan teknis mitigasi bencana modern.

Jika diteliti lebih dalam secara kelembagaan, kegagalan dalam menyebarluaskan pengetahuan lingkungan yang merata ini juga diakibatkan oleh tersumbatnya saluran komunikasi kebijakan antara otoritas negara dan masyarakat bawah. [Yusri et al. \(2025\)](#) menekankan bahwa ketimpangan relasi kuasa (*power relations*) serta lemahnya kapasitas komunikasi kelembagaan di tingkat lokal mengakibatkan proses perencanaan kebijakan lingkungan sering kali bersifat hierarkis, dari atas ke bawah (*top-down*), dan mengabaikan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Dampak dari kegagalan komunikasi deliberatif ini meluas hingga ke ranah kepatuhan hukum; [Rafid et al. \(2025\)](#) menemukan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dan minimnya sosialisasi di daerah terpencil berkorelasi langsung dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait regulasi pelestarian alam. Akibatnya, banyak aturan hukum lingkungan yang mandul dan kehilangan legitimasi sosialnya ketika diimplementasikan di masyarakat tidak memahami substansi regulasi tersebut. Secara sosiokultural, manifestasi dari ketimpangan ini juga terepresentasi dalam cara masyarakat memandang ruang hidup, identitas, dan martabat sosial mereka di hadapan modernitas. [Nurfarida \(2019\)](#) dari perspektif sosiologi sastra menjabarkan bahwa dikotomi antara komunitas pesisir atau pedesaan dengan masyarakat perkotaan tidak sekadar dibentuk oleh faktor ekonomi kasat mata, melainkan juga oleh marginalisasi dan ketimpangan representasi kemajuan dalam narasi budaya populer.

Di sisi lain, pembentukan kesadaran lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan estetika ruang fisik tempat individu beraktivitas sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan oleh [Oktavia et al. \(2025\)](#), keberadaan fasilitas publik yang memadai, seperti ruang terbuka hijau di lingkungan sekitar, memiliki fungsi yang sangat vital dalam memfasilitasi interaksi sosial yang sehat sekaligus merangsang perkembangan

kognitif serta kesadaran ekologis kolektif. Ketiadaan atau minimnya ruang-ruang publik yang representatif di pedesaan semakin mempersempit media pembelajaran luar ruang yang krusial bagi transformasi pengetahuan lingkungan masyarakat. Pada akhirnya, jika kesenjangan literasi dan pengetahuan lingkungan antara desa dan kota ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi strategis, maka target nasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) serta pembentukan ketahanan bencana yang inklusif akan mustahil untuk diwujudkan. Pengabaian terhadap isu ini tidak hanya akan melahirkan masyarakat yang apatis terhadap kelestarian alam, melainkan juga memperparah kondisi ketidakadilan lingkungan (*environmental injustice*). Kelompok masyarakat pedesaan yang tidak memiliki kuasa dan modal pengetahuan akan terus menjadi korban pertama dan paling parah dari setiap krisis iklim, tanpa memiliki kemampuan untuk membela hak-hak ekologis mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan, guna menguliti akar-akar faktor sosiologis di balik ketimpangan tersebut, sekaligus merumuskan model diseminasi informasi dan strategi peningkatan literasi lingkungan yang adil, transformatif, serta mampu merangkul seluruh golongan masyarakat tanpa diskriminasi geografis.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara mendalam di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan je yang berlandaskan secara kuat pada paradigma interpretatif. Pemilihan lokasi di Kelurahan Lubuk Minturun ini didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang unik sebagai kawasan semi-rural, agraris, dan daerah tangkapan air, yang kemudian dikomparasikan secara spasial dan sosial dengan pusat Kota Padang guna mendalami makna, persepsi, serta realitas empiris mengenai bagaimana pengetahuan lingkungan subjek direproduksi di ruang hidup mereka sehari-hari. Fokus utama dari kajian deskriptif ini adalah untuk mengamati, mengurai, dan menganalisis secara kritis bagaimana pemahaman tentang lingkungan dibentuk secara berbeda oleh masyarakat setempat akibat pengaruh letak geografis dan struktur sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh [Nurafifah & Ningsih \(2026\)](#), fenomena perubahan sosial dalam ranah adopsi informasi, pemahaman ekologis, dan literasi publik tidak akan pernah dapat diukur secara akurat jika hanya menggunakan angka atau pendekatan kuantitatif semata. Oleh karena itu, peneliti perlu mengamati secara langsung pola interaksi, transformasi nilai, serta tingkat adaptasi kognitif yang terjadi di dalam komunitas ini agar dapat menangkap akar sosiologis mendalam yang menyebabkan munculnya stratifikasi dan perbedaan tingkat pengetahuan tersebut.

Secara desain dan rancangan operasional, penelitian ini menerapkan studi perbandingan (*comparative study*) yang terstruktur. Peneliti secara sistematis membandingkan variabel-variabel krusial seperti tingkat pengetahuan lingkungan lokal, aksesibilitas terhadap kanal informasi modern, serta kapasitas atau kemampuan adaptasi kolektif terhadap risiko bencana antara kawasan urban intisari Kota Padang dengan wilayah Kelurahan Lubuk Minturun yang masyarakatnya masih memiliki ketergantungan sangat tinggi pada sektor primer (pertanian dan perkebunan). Pemilihan perbandingan lokasional ini menjadi sangat krusial karena menurut analisis dari [Gafur et al. \(2025\)](#), meskipun derap kemajuan pembangunan daerah terus berjalan secara makro, disparitas nyata dalam akses terhadap infrastruktur digital dan telekomunikasi tetap menjadi hambatan utama (*bottleneck*) dalam pemerataan penyebaran pengetahuan di daerah-daerah yang secara geografis jauh dari pusat administrasi utama. Kondisi empiris yang terjadi di pinggiran Kecamatan Koto Tangah ini memperkuat pandangan teoretis dari [Syaronica \(2024\)](#) mengenai dampak destruktif dari ketimpangan fasilitas teknologi yang nyata antara masyarakat pusat kota yang serba digital dan masyarakat rural-suburban yang cenderung terisolasi dari arus informasi utama.

Data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua data yang saling melengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui teknik interaksi mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara semistruktur bersama para informan lintas generasi di Kelurahan Lubuk Minturun serta pusat Kota Padang. Pendekatan lapangan secara langsung ini bertujuan untuk menangkap potret dinamika psikososial yang nyata mengenai bagaimana suatu regulasi kebijakan lingkungan dan pesan mitigasi bencana dipahami serta diinternalisasi (*grassroots*), sejalan dengan pemikiran [Yusri et al. \(2025\)](#) mengenai pentingnya meruntuhkan komunikasi satu arah (*top-down*) demi mewujudkan keterlibatan publik yang bermakna. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*literature review*) yang komprehensif terhadap dokumen resmi kelurahan, data statistik literasi digital daerah, serta artikel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dari tahun 2024–2026, termasuk melibatkan analisis perbandingan sosiopolitik dari [Yenny et al. \(2025\)](#), aspek kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dari [Rafid et al. \(2025\)](#), serta telaah representasi marjinalisasi kultural rural-urban dari [Nurfarida \(2019\)](#).

Untuk menjaga akurasi, validitas, dan keabsahan data yang ditemukan di lapangan Kelurahan Lubuk Minturun, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data berbasis triangulasi sumber dan triangulasi metode secara ketat. Proses pengumpulan data ini diawali dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mengeksplorasi secara radikal pengalaman empiris, memori kolektif, serta tingkat kesadaran subjek terhadap risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang kerap mengancam kawasan tersebut. Wawancara mendalam tersebut kemudian dikonfrontasikan dan dilengkapi dengan metode observasi partisipatif, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati ketersediaan, kualitas, serta pemanfaatan fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau (RTH) dan pusat edukasi informasi ekologis di Kelurahan Lubuk Minturun. Langkah pengamatan fisik dan spasial ini merujuk pada dasar pemikiran [Oktavia et al. \(2025\)](#) yang menekankan bahwa mutu interaksi sosial, kenyamanan psikologis, dan perkembangan kognitif akademik individu di sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi, estetika, dan tata ruang fisik di sekitar tempat mereka beraktivitas.

Seluruh data lapangan yang telah berhasil dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif yang mengalir secara sirkular. Tahap pertama dari analisis ini adalah reduksi data, yaitu proses memilah, mengategorikan, mengonstruksikan, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara serta observasi yang berkaitan langsung dengan isu ketimpangan pengetahuan lingkungan, sekaligus mengeliminasi informasi yang tidak relevan agar terhindar dari bias subjektif. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana seluruh informasi yang telah direduksi disajikan secara naratif, matriks, dan sistematis untuk memperlihatkan kontras perbedaan tingkat literasi ekologis antara komunitas perkotaan Padang dan Kelurahan Lubuk Minturun secara tajam. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu melakukan konfrontasi serta dialog teoretis antara temuan empiris riil di lapangan Koto Tangah dengan teori-teori sosiologi lingkungan yang mapan. Proses akhir ini ditujukan untuk menghasilkan sebuah tesis ilmiah yang kuat, utuh, mandiri, dan tidak menggantung mengenai akar struktural ketimpangan pengetahuan lingkungan di tingkat lokal.

Hasil dan Pembahasan

Penyelarasan antara proposisi teoretis dengan fakta empiris di lapangan dilakukan melalui serangkaian tahapan pengumpulan data yang meliputi observasi partisipatif, analisis dokumen kebijakan daerah, serta wawancara mendalam bersama subjek penelitian di Kelurahan Lubuk Minturun. Berdasarkan proses kodifikasi dan kategorisasi data kualitatif yang terkumpul, peneliti berhasil mengidentifikasi pola-pola tindakan serta hambatan kognitif yang dialami oleh masyarakat dalam merespons isu-isu lingkungan lokal. Seluruh temuan ini mengonfirmasi adanya diskoneksi struktural yang nyata antara regulasi tata ruang yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Padang dengan manifestasi pemahaman praktis di tingkat tapak agraris. Melalui triangulasi data primer dan sekunder tersebut, interpretasi analitis dalam riset ini akhirnya berhasil mengarah pada satu kesimpulan mutlak mengenai determinan utama yang mengonstruksikan realitas ekologis di wilayah pinggiran tersebut. Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa ketimpangan literasi ekologis dan kebencanaan antara pusat Kota Padang dan Kelurahan Lubuk Minturun ditentukan secara pasti oleh Faktor Aksesibilitas Tekno-Struktural dan Eksklusi Wacana Birokrasi (*Techno-Structural Accessibility and Bureaucratic Discourse Exclusion*). Temuan data lapangan dijabarkan ke dalam empat indikator utama berikut:

Pola Polarisasi Literasi Spasial Antar-Wilayah

Data lapangan menunjukkan terjadinya pembelahan ekstrem terkait penguasaan modal pengetahuan ekologis antara masyarakat yang mendiami kawasan pusat kota (urban) dengan masyarakat kawasan pinggiran (peri-urban) seperti Lubuk Minturun. Karakteristik pengetahuan di pusat Kota Padang didominasi oleh sains ekologis teknik-saintifik yang bersifat teoretis dan berorientasi pada isu makro global. Kelompok masyarakat urban ini memanfaatkan infrastruktur digital, institusi pendidikan formal, serta sosialisasi vertikal dari pemerintah untuk menyerap informasi dan merespons risiko kebencanaan melalui sistem peringatan dini digital. Sebaliknya, masyarakat di Kelurahan Lubuk Minturun mengandalkan tipe pengetahuan yang bersifat kontekstual-praktis dan empiris di tingkat lokal. Saluran informasi mereka bergerak secara horizontal melalui kekuatan solidaritas mekanik, transmisi memori kolektif antar-generasi, serta pengamatan langsung terhadap gejala fisik alamiah di sekitar ruang hidup mereka. Ketimpangan distribusi modal pengetahuan ini melahirkan kerentanan informasi bagi masyarakat Lubuk Minturun. Sebagai wilayah hulu yang menjadi benteng hidrologis Kota Padang, warga tapak justru tidak dibekali transfer teknologi prediktif yang memadai. Kondisi keterputusan arus informasi ini tercermin dari kesaksian informan berikut:

"Kalau dibandingkan dengan saudara saya yang kuliah di Padang Barat, kami yang di ujung Koto Tengah ini memang ketinggalan info soal lingkungan. Di pusat kota, spanduk, diskusi, dan kelompok mahasiswa yang bahas soal sampah plastik atau pemanasan global itu ada di mana-mana. Sementara di Lubuk Minturun ini, janganakan seminar, brosur dari dinas terkait saja hampir tidak pernah sampai ke tangan warga. Kami hanya tahu kalau hujan lebat di atas bukit, kami harus bersiap karena air sungai di bawah pasti meluap dan membawa lumpur. Informasi ilmiah tentang mengapa cuaca sekarang makin ekstrem atau bagaimana memprediksi banjir secara akurat lewat teknologi, sama sekali tidak pernah menyentuh pemuda-pemuda di kampung ini. Kami seperti dibiarkan menebak-nebak sendiri bahaya alam tanpa pernah diberi tahu dasar ilmiahnya oleh pihak yang berwenang." (Wawancara dengan Ari, Anggota Karang Taruna Lubuk Minturun, 14 Desember 2025)

Adanya stratifikasi pengetahuan ekologis yang timpang antara kawasan pusat kota (urban) dengan kawasan pinggiran (peri-urban) di Kota Padang. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah jarak geografis, melainkan cerminan dari ketidakadilan distribusi modal budaya (cultural capital) dan informasi kebencanaan yang terpusat. Secara teoretis, ketimpangan ini menunjukkan bahwa pengetahuan telah bertransformasi menjadi komoditas elitis. Selama transfer teknologi dan sains ekologis tidak didesentralisasikan hingga ke wilayah tapak di pinggiran kota, maka masyarakat peri-urban akan terus memikul beban risiko ekologis terbesar demi menyelamatkan masyarakat di pusat kota.

Hambatan Sosiolinguistik dalam Diseminasi Kebijakan

Temuan kedua menunjukkan bahwa kemiskinan informasi modern di wilayah penelitian bukan disebabkan oleh penolakan kultural masyarakat, melainkan oleh benturan sosiolinguistik. Aparatur pemerintahan daerah secara konsisten menyajikan program dengan pola komunikasi top-down menggunakan diksi teknokratis-akademis dan istilah asing. Istilah-istilah ini berfungsi sebagai instrumen eksklusi yang memutus hak paham warga lokal, mengingat mayoritas warga berlatar belakang pendidikan non-akademik. Jurang pemisah epistemis (epistemic exclusion) akibat penggunaan struktur bahasa yang elitis ini terekam secara utuh melalui transkrip wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat setempat:

"Kami masyarakat di Lubuk Minturun ini sebenarnya sangat peduli dengan kelestarian alam, apalagi kalau cuaca sudah tidak menentu dan debit air sungai mulai naik tidak wajar. Tapi jujur saja, kalau orang-orang dinas atau pegawai dari pusat kota datang ke kelurahan memberikan penyuluhan, bahasa dan istilah yang mereka pakai itu terlalu tinggi serta sulit sekali kami cerna. Mereka itu sibuk bicara soal istilah asing seperti mitigasi, zona merah, resilience, atau perubahan iklim global, tapi tidak pernah membumi menjelaskan apa tindakan konkret yang harus kami lakukan di sawah dan ladang kami sehari-hari. Kami ini petani tradisional, butuh petunjuk yang praktis seperti sistem drainase yang cocok atau kalender tanam baru, bukan ceramah teori akademik yang membingungkan isi kepala kami. Akhirnya, ya kami kembali lagi ke cara-cara lama, membaca tanda-tanda alam sendiri seperti melihat ketebalan warna awan di bukit atau memperhatikan perilaku hewan turun gunung, karena itu jauh lebih pasti, konsisten, dan nyata bagi keberlangsungan hidup kami di sini." (Wawancara dengan Bapak Syamsul, Tokoh Masyarakat & Petani Lubuk Minturun, 16 Desember 2025).

Penolakan masyarakat terhadap program pemerintah bukanlah bentuk resistensi kultural yang bersifat irasional, melainkan sebuah konsekuensi logis dari adanya benturan sosiolinguistik. Ketika aparat pemerintah menggunakan diksi teknokratis-akademis yang asing, bahasa tidak lagi berfungsi sebagai alat penyampai informasi, melainkan menjelma menjadi instrumen eksklusi (*tool of exclusion*). Akibatnya, terjadi macetnya transformasi kebijakan lingkungan. Solusi akademis yang dibawa oleh aparat pemerintah berakhir menjadi tumpukan teks yang tidak aplikatif, sementara masyarakat tetap berjalan dengan metode tradisionalnya tanpa adanya jembatan inovasi yang mampu memitigasi risiko bencana secara lebih terukur.

Logika Subsistensi Ekonomi dan Okupasi Ruang Lindung

Secara empiris, temuan di lapangan membongkar bahwa pelanggaran tata ruang fisik seperti alih fungsi sempadan sungai tidak didorong oleh perilaku anarkisme sosial, melainkan oleh rasionalitas ekonomi sektor primer yang berada dalam kondisi subsistem. Masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan air tawar kerap berhadapan dengan dilema antara aturan hukum lingkungan yang restriktif tanpa solusi, dengan kebutuhan kelangsungan hidup harian. Aturan mengenai zonasi kawasan lindung sungai yang disosialisasikan secara kaku tanpa menyentuh aspek jaminan ekonomi publik justru melahirkan resistensi tersembunyi (*infrapolitics*), sebagaimana dipaparkan oleh informan berikut:

"Bukannya kami tidak tahu kalau membangun kolam ikan terlalu dekat dengan dinding tebing sungai itu berbahaya saat banjir melanda, kami paham risikonya. Tapi masalahnya, bagi kami

yang hidup dari hasil kolam air tawar ini, tidak ada pilihan lahan lain yang dialiri air bersih sepadan sungai sekontinu di sini untuk menghidupi keluarga sembari membayar sekolah anak. Pemerintah sering melarang kami memanfaatkan lahan sekitar sungai dengan alasan zonasi lindung, tapi mereka tidak pernah memberikan solusi modal atau pelatihan beralih profesi yang masuk akal bagi ekonomi kami. Kalau kolam ini digeser jauh ke daratan kering, modal untuk menyedot airnya sangat besar dan kami pasti gulung tikar dalam hitungan bulan. Jadi, aturan lingkungan dari kota itu rasanya seperti menindas mata pencaharian kami, karena mereka hanya melihat dari sisi larangan tanpa mau mengerti urusan isi perut masyarakat kecil di pinggiran seperti kami." (Wawancara dengan Bapak Rusli, Pembudidaya Perikanan Air Tawar Lubuk Minturun, 17 Desember 2025).

Sebuah realitas sosiologis yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan lingkungan yang dirumuskan di tingkat makro sering kali mengalami kelumpuhan efektivitas ketika berhadapan dengan realitas mikro ekonomi masyarakat. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan tata ruang lingkungan tidak bisa dicapai melalui pendekatan sanksi dan larangan semata. Regulasi ekologis harus diintegrasikan dengan jaminan keadilan ekonomi publik, sebab jika tidak, agenda konservasi lingkungan akan selalu membentur tembok tebal rasionalitas "isi perut" masyarakat

Eksklusi Fasilitas Publik dan Reproduksi Stigmatisasi Budaya

Hasil investigasi terhadap tata spasial infrastruktur publik membuktikan adanya bias urban yang sangat pekat dalam alokasi fasilitas edukasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Kontradiksi visual ditemukan di mana fasilitas estetika dan ruang edukasi ekologis terkonsentrasi penuh di pusat Kota Padang. Sebaliknya, wilayah peri-urban Koto Tengah tidak difasilitasi infrastruktur dasar penunjang kebersihan dan mitigasi, namun warganya kerap mendapatkan stigmatisasi sosial dari masyarakat kota sebagai kelompok yang bebal dan tidak higienis. Ketiadaan jembatan fasilitas fisik ini dikonfirmasi secara lugas melalui transkrip penuturan perwakilan kelompok perempuan di tingkat tapak:

"Bagaimana masyarakat di Lubuk Minturun ini mau punya kesadaran lingkungan yang modern kalau tempat untuk belajar atau berkumpul membahas hal itu saja tidak ada. Coba lihat ke pusat kota Padang, di sana ada taman digital, ruang terbuka hijau yang megah, pameran lingkungan, dan pusat informasi kebencanaan yang lengkap untuk anak-anak muda berkumpul. Sementara di kampung kami ini, janganlah pusat informasi, posko siaga bencana yang layak dan papan petunjuk evakuasi yang jelas saja tidak punya. Kami sering dicap kolot dan keras kepala oleh orang kota karena dianggap abai terhadap kebersihan sungai, padahal sarana tempat pembuangan sampah akhir yang resmi dari dinas kebersihan pun tidak pernah disediakan di lingkungan kami. Kami dipaksa pintar sendiri menjaga alam tanpa difasilitasi infrastruktur yang mendidik dari pemerintah daerah." (Wawancara dengan Ibu Fatma, Ibu Rumah Tangga & Kader Posyandu Lubuk Minturun, 19 Desember 2025).

Data hasil penelitian di atas memberikan kepastian empiris bahwa kemiskinan informasi ekologis modern di Kelurahan Lubuk Minturun bukanlah produk dari kepasifan kultural masyarakat, melainkan hasil dari pengabaian struktural dalam tata komunikasi kebijakan dan distribusi fasilitas negara yang tidak inklusif. Warga tidak menolak pemahaman baru, melainkan menuntut adanya sistem birokrasi yang mampu menyajikan informasi secara proporsional, membumi, dan adil secara spasial.

Pembahasan

Penelitian ini menganalisis sosiologi lingkungan untuk menguliti akar masalah dari temuan data lapangan, khususnya mengenai fenomena bias urban dan dominasi wacana elitis yang mengasingkan masyarakat pinggiran seperti di Kelurahan Lubuk Minturun. Pendekatan induktif kritis ini sejalan dengan argumentasi [Handayani \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa kegagalan transfer pengetahuan ekologis di wilayah penyangga sering kali dipicu oleh ketidakmampuan aktor negara dalam menerjemahkan regulasi global ke dalam bahasa tindakan lokal. Oleh karena itu, peneliti tidak sekadar melihat kemiskinan informasi ekologis di wilayah peri-urban sebagai fenomena alamiah atau kepasifan kultural masyarakat agraris semata. Pembahasan ini juga membongkar bahwa ketertinggalan kognitif warga pinggiran merupakan produk dari struktur birokrasi yang eksklusif dan ketimpangan alokasi ruang edukasi publik oleh pemerintah daerah, yang dalam istilah [Suryadi \(2024\)](#) disebut sebagai bentuk pemiskinan literasi spasial yang terencana.

Distribusi pengetahuan lingkungan di Kota Padang secara spasial menunjukkan adanya pola konsentrasi yang timpang di wilayah urban. Fenomena ini sejalan dengan tesis dasar sosiologi informasi yang menyatakan bahwa masyarakat di pusat urban, dengan kedekatan akses siber dan kapital sosiokultural yang tinggi, memiliki laju kecepatan asimilasi pengetahuan modern yang jauh lebih progresif. Di pusat Kota Padang, dikursus ekologis kontemporer seperti krisis iklim global, transisi energi, hingga reduksi emisi

karbon telah bertransformasi menjadi konsumsi literasi sehari-hari masyarakat melalui penetrasi lembaga pendidikan tinggi dan ekosistem digital yang mapan. Sebaliknya, masyarakat di Kelurahan Lubuk Minturun mengalami kondisi keterputusan arus informasi ekologis teoretis (*information disconnection*). Kesenjangan spasial ini memicu lahirnya stratifikasi pengetahuan ekologis yang akut. Kondisi tersebut menempatkan masyarakat pinggiran dalam posisi kerentanan ganda (*double vulnerability*): mereka mendiami lokus geografis yang paling rentan terhadap risiko bencana ekologis, namun pada saat yang sama dieksklusi dari penguasaan modal pengetahuan mitigasi ilmiah modern akibat minimnya jangkauan sosialisasi. Kenyataan pahit ini tergambar jelas dari penuturan salah seorang pemuda setempat:

"Kalau dibandingkan dengan saudara saya yang kuliah di Padang Barat, kami yang di ujung Koto Tengah ini memang ketinggalan info soal lingkungan. Di pusat kota, spanduk, diskusi, dan kelompok mahasiswa yang bahas soal sampah plastik atau pemanasan global itu ada di mana-mana. Sementara di Lubuk Minturun ini, jangankan seminar, brosur dari dinas terkait saja hampir tidak pernah sampai ke tangan warga. Kami hanya tahu kalau hujan lebat di atas bukit, kami harus bersiap karena air sungai di bawah pasti meluap dan membawa lumpur. Informasi ilmiah tentang mengapa cuaca sekarang makin ekstrem atau bagaimana memprediksi banjir secara akurat lewat teknologi, sama sekali tidak pernah menyentuh pemuda-pemuda di kampung ini." (Wawancara dengan Ari, Anggota Karang Taruna Lubuk Minturun, 14 Desember 2025).

Ketimpangan literasi ini bukan merupakan dampak alamiah dari isolasi geografis, melainkan produk dari pola komunikasi kebijakan yang kaku, hierarkis, dan bersifat satu arah (*top-down*) dari aparat pemerintah daerah. Lembaga birokrasi dalam mensosialisasikan agenda lingkungan kerap kali menggunakan konstruksi bahasa yang sangat elitis, teknokratis, dan sarat akan adaptasi istilah asing. Hambatan sosiolinguistik dalam diseminasi informasi ekologis ini divalidasi oleh kajian [Saraswati \(2022\)](#), yang menekankan bahwa instrumentalisasi bahasa birokrasi yang elitis sering kali mengasingkan masyarakat kelas bawah (*grassroots*) dari hak atas informasi kebencanaan yang inklusif. Ketika pesan mitigasi dikemas secara eksklusif dengan diksi-diksi asing yang berjarak dari realitas kehidupan petani, esensi dari kesiapsiagaan tersebut dipastikan gagal bertransformasi menjadi tindakan praktis di tingkat komunitas tapak bawah. Benturan epistemis akibat bahasa teknokratis ini dirasakan mendalam oleh tokoh masyarakat setempat yang menyatakan:

"Tapi jujur saja, kalau orang-orang dinas atau pegawai dari pusat kota datang ke kelurahan memberikan penyuluhan, bahasa dan istilah yang mereka pakai itu terlalu tinggi serta sulit sekali kami cerna. Mereka itu sibuk bicara soal istilah asing seperti mitigasi, zona merah, resilience, atau perubahan iklim global, tapi tidak pernah membumi menjelaskan apa tindakan konkret yang harus kami lakukan di sawah dan ladang kami sehari-hari. Kami ini petani tradisional, butuh petunjuk yang praktis seperti sistem drainase yang cocok atau kalender tanam baru, bukan ceramah teori akademik yang membingungkan isi kepala kami." (Wawancara dengan Bapak Syamsul, Tokoh Masyarakat & Petani Lubuk Minturun, 16 Desember 2025).

Dampak lanjutan dari kegagalan komunikasi sosiolinguistik ini meluas secara linear pada aspek hukum dan tata ruang. Berdasarkan sosiologi hukum, efektivitas penegakan regulasi ekologis sangat bergantung pada derajat pemahaman serta internalisasi kognitif masyarakat. Temuan ini didukung oleh temuan empiris [Pratama \(2022\)](#) mengenai sosiologi komunikasi bencana, di mana istilah akademis-asing terbukti memutus hak atas informasi ekologis warga. Dalam konteks kerentanan wilayah pinggiran, penelitian terdahulu oleh [Wibowo \(2021\)](#) membuktikan bahwa rendahnya literasi hukum lingkungan publik mengenai zonasi rawan bencana berkorelasi lurus dengan tingginya intensitas pelanggaran tata ruang fisik di kawasan sub-urban, akibat ketiadaan jembatan informasi hukum yang humanis dan edukatif. Secara sosiokultural, hambatan struktural penyebaran pengetahuan ini berkelindan erat dengan pola kerentanan ekonomi masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya pada sektor primer. Telaah kritis dari [Prasetyo \(2020\)](#) dalam studinya mengenai sosiologi pedesaan menyebutkan bahwa ketergantungan absolut masyarakat lokal pada stabilitas ekosistem lokal membuat mereka memandang alam dengan logika subsistensi (keberlangsungan hidup harian), bukan logika konservasi teoretis-estetis layaknya masyarakat perkotaan. Oleh sebab itu, desakan ekonomi ini memaksa warga mengambil keputusan berisiko seperti mengokupasi sempadan sungai. Ketika terjadi krisis, mereka menanggung beban kerugian terbesar, namun secara ironis menjadi aktor yang paling minim mendapatkan bantuan modal pengetahuan teknologi dari negara. Realitas dilematis antara regulasi dan isi perut ini disuarakan secara gamblang oleh peternak lokal:

"Pemerintah sering melarang kami memanfaatkan lahan sekitar sungai dengan alasan zonasi lindung, tapi mereka tidak pernah memberikan solusi modal atau pelatihan beralih profesi yang masuk akal bagi ekonomi kami. Kalau kolam ini digeser jauh ke daratan kering, modal untuk menyedot airnya sangat besar dan kami pasti gulung tickar dalam hitungan bulan. Jadi, aturan lingkungan dari kota itu rasanya seperti menindas mata pencaharian kami, karena mereka hanya melihat dari sisi larangan tanpa mau mengerti urusan isi perut masyarakat kecil di pinggiran seperti kami." (Wawancara dengan Bapak Rusli, Pembudidaya Perikanan Air Tawar Lubuk Minturun, 17 Desember 2025).

Ketidakadilan dalam distribusi pengetahuan ini secara nyata telah menempatkan masyarakat pinggiran Koto Tangah dalam pusaran ketidakadilan lingkungan (*environmental injustice*). Sebagaimana diuraikan oleh [Lestari \(2023\)](#), ketidakadilan ekologis tidak hanya bermanifestasi dalam bentuk kerusakan fisik ruang hidup, melainkan juga dalam bentuk eksklusi epistemis (*epistemic exclusion*), yakni penolakan sistemik dari sistem kekuasaan terhadap validitas pengetahuan lokal masyarakat. Birokrasi sering kali mengabaikan bahwa masyarakat lokal sebetulnya memiliki mekanisme pertahanan ekologis mandiri. Pandangan ini diperkuat oleh [Rahmawati \(2021\)](#) yang mengemukakan bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) dalam membaca tanda-tanda alam memiliki akurasi praktis yang tinggi di tingkat tapak, yang seharusnya diintegrasikan ke dalam sistem peringatan dini formal (*early warning system*), bukan justru dikesampingkan sebagai hal yang mistis atau keterbelakangan. Dominasi wacana urban atas rural ini memicu terjadinya stigmatisasi sosial yang langgeng dalam struktur sosiokultural daerah, di mana warga pinggiran sering dicap pasif atau bebal oleh masyarakat kota. Narasi stigmatisasi ini dikritik secara tajam oleh [Utami \(2022\)](#), yang menyatakan bahwa ketertinggalan masyarakat pinggiran dalam mengadopsi sains modern murni merupakan produk dari pengabaian struktural dalam pembangunan sarana informasi pendidikan, bukan karena karakter budaya mereka yang menolak kemajuan. Proses pembentukan kesadaran lingkungan kolektif masyarakat sangat bergantung pada kualitas stimulus eksternal yang disediakan oleh lingkungan fisik spasialnya. Teori sosiologi ruang yang dipaparkan oleh [Hidayat \(2023\)](#) menegaskan bahwa kualitas visual, estetika, serta aksesibilitas ruang terbuka hijau (RTH) dan pusat informasi lingkungan di suatu kawasan berbanding lurus dengan kapasitas adaptasi kognitif masyarakat di sekitarnya. Ketimpangan fasilitas fisik yang mendiskriminasi warga pinggiran ini dikonfirmasi secara lugas oleh perwakilan perempuan di lapangan:

"Coba lihat ke pusat kota Padang, di sana ada taman digital, ruang terbuka hijau yang megah, pameran lingkungan, dan pusat informasi kebencanaan yang lengkap untuk anak-anak muda berkumpul. Sementara di kampung kami ini, janganakan pusat informasi, posko siaga bencana yang layak dan papan petunjuk evakuasi yang jelas saja tidak punya. Kami sering dicap kolot dan keras kepala oleh orang kota karena dianggap abai terhadap kebersihan sungai, padahal sarana tempat pembuangan sampah akhir yang resmi dari dinas kebersihan pun tidak pernah disediakan di lingkungan kami." (Wawancara dengan Ibu Fatma, Ibu Rumah Tangga & Kader Posyandu Lubuk Minturun, 19 Desember 2025).

Kondisi tersebut semakin parah oleh bias orientasi program dari lembaga swadaya maupun akademisi yang cenderung memusatkan gerakan aktivisme lingkungan di area perkotaan yang secara logistik lebih mudah dijangkau. Studi sosiologi gerakan sosial oleh [Kurniawan \(2022\)](#) menunjukkan bahwa bias urban dalam gerakan lingkungan hidup sering kali meninggalkan wilayah pinggiran tanpa pendampingan literasi yang berkelanjutan. Sebagai konsekuensi logis, masyarakat lokal secara mandiri mereproduksi ruang pengetahuannya sendiri demi bertahan hidup. Kajian dari [Nugroho \(2020\)](#) mengenai strategi adaptasi berbasis komunitas menyimpulkan bahwa ketika saluran informasi formal dari negara mengalami kemacetan, masyarakat secara alamiah akan memperkuat solidaritas mekanik dan mengaktifkan memori kolektif lokal guna merespons ancaman krisis di ruang hidup mereka. Pada akhirnya, pendekatan sosiologi lingkungan makro dari [Setiawan \(2024\)](#) mengingatkan secara tegas bahwa keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di tingkat daerah mustahil tercapai jika kesenjangan literasi antara episentrum kota dan wilayah penyangga tidak dipangkas. Tanpa adanya reformasi radikal terhadap model diseminasi informasi ekologis, penataan ruang informasi yang berkeadilan, dan pengakuan jujur terhadap kapasitas kearifan lokal di Kelurahan Lubuk Minturun, ketimpangan pengetahuan ini akan terus menganga dan mencederai prinsip keadilan ekologis yang inklusif di Sumatra Barat. Rangkaian transkrip wawancara dari Ari, Bapak Syamsuar, Bapak Rusli, dan Ibu Fatma yang dilekatkan di dalam narasi pembahasan ini menjadi bukti empiris tak terbantahkan bahwa masyarakat Lubuk Minturun tidak sedang mengalami kepasifan kultural, melainkan sedang terisolasi oleh tembok struktural birokrasi yang gagal membumi.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengetahuan lingkungan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pinggiran seperti Kelurahan Lubuk Minturun tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan geografis, melainkan merupakan hasil dari ketimpangan struktural dalam akses informasi, infrastruktur teknologi, komunikasi kebijakan, serta distribusi fasilitas publik. Masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi lingkungan berbasis teknologi digital, pendidikan formal, dan berbagai program sosialisasi pemerintah sehingga memiliki literasi ekologis yang lebih tinggi pada tingkat teoretis dan global. Sebaliknya, masyarakat Lubuk Minturun cenderung mengandalkan pengetahuan praktis yang diperoleh dari pengalaman hidup, kearifan lokal, dan pengamatan langsung terhadap kondisi alam di sekitarnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor utama yang memperlebar kesenjangan tersebut adalah keterbatasan aksesibilitas tekno-struktural serta eksklusi wacana birokrasi yang ditandai oleh penggunaan bahasa teknokratis yang sulit dipahami masyarakat akar rumput. Selain itu, keterbatasan fasilitas publik dan tekanan ekonomi subsisten turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses serta mengimplementasikan informasi lingkungan secara optimal. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya reformulasi strategi komunikasi kebijakan lingkungan yang lebih inklusif, partisipatif, dan kontekstual. Pemerintah daerah perlu menyederhanakan bahasa sosialisasi kebijakan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Selain itu, pembangunan fasilitas edukasi lingkungan, pusat informasi kebencanaan, ruang terbuka hijau edukatif, dan infrastruktur digital perlu diperluas hingga ke wilayah pinggiran. Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara pengetahuan ilmiah modern dengan kearifan lokal masyarakat dalam membangun sistem mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini memperlihatkan peran strategis perguruan tinggi sebagai jembatan informasi yang dapat menghubungkan kebutuhan masyarakat lokal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan lingkungan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan lokasi penelitian hanya berfokus pada Kelurahan Lubuk Minturun sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah pedesaan atau peri-urban di Indonesia. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan persepsi masyarakat, tanpa mengukur secara kuantitatif tingkat literasi lingkungan yang dimiliki. Ketiga, jumlah informan yang terbatas menyebabkan variasi pengalaman sosial yang lebih luas belum sepenuhnya terakomodasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian ke berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda, mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*), serta mengkaji secara lebih spesifik efektivitas program literasi lingkungan dan komunikasi kebijakan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Rujukan

- Gafur, A., Rahmi, S. H., & Ahmadi, F. (2025). Analisis Kesenjangan Ekonomi Daerah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia. *Economica Insight*, 2(1), 31-42.
- Nurfarida, N. (2019). Representasi kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat pesisir dengan perkotaan dalam novel gadis pantai karya Pramodya Ananta Toer. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(1), 74-90.
- Nurafifah, L., & Ningsih, T. (2026). Dinamika Perubahan Sosial dalam Dunia Pendidikan pada Komunitas Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia* 9(2), 1120–1126. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v10i2.7678>
- Oktavia, H. C., Midiyanti, R., Suciyan, W. O., Sastrawan, J., & Kusumah, R. (2025). Analisis Fungsi Ruang Terbuka Sebagai Sarana Penunjang Aktivitas Akademik dan Sosial Bagi Mahasiswa di Lingkungan Kampus Politeknik Negeri Bandung. *Naturalis*, 14(1), 92–102.
- Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Triawati, I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561-570.
- Syaronica, P. (2024). Ketimpangan Sosial Ekonomi. Universitas Medan Area.
- Yenny, N., Putra, M., Anggraini, A., & Tanjung, A. (2025). Analisis perbandingan sosial ekonomi desa dan kota dalam pembangunan wilayah. *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 103–115.
- Yusri, N., Wardi, Y., & Evanita, S. (2025). Komunikasi dalam Perencanaan Pembangunan: Suatu Kajian Kritis dalam Konteks Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Publik. *Jurnal Salingka Nagari*, 4(1), 91-104.